

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA BAGIAN PERTANIAN PADA DINAS
PANGAN PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**RIDWAN
NPM. 1602110347**



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RIDWAN
NPM : 1602110347

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFFESIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA BAGIAN PERTANIAN PADA DINAS PANGAN PERTANIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA Banda Aceh Tahun 2016-2019**

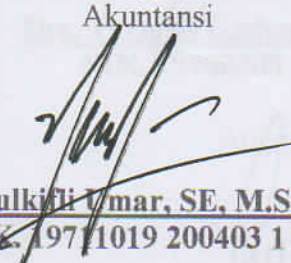
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si., Ak
NIK. 19711019 200403 1 067


Irmawati, SE, M.Si., Ak
NIK. 19750211 200406 2001


M. Fahriansyah, SE, M.Si., Ak
NIK. 19840211 200802 1 001



Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si.MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RIDWAN

NPM : 1602110347

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFFESIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA BAGIAN PERTANIAN PADA DINAS PANGAN PERTANIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA Banda Aceh TAHUN 2016-2019**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 25 Februari 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si. MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

H.Zulkifli Umar, SE, M.Si.,Ak
NIK. 19711019 200403 1 067

Anggota

Irmawati, SE, M.Si.,Ak
NIK. 19750211 200406 2001

Anggota

M. Fahriansyah, SE, M.Si.,Ak
NIK. 19840211 200802 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si.,Ak
NIK. 19711019 200403 1 067

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.

Banda Aceh, 10 Maret 2021
Yang Menyatakan



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN
NPM : 1602110347
Program Studi : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFFESIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BAGIAN PERTANIAN PADA DINAS PANGAN PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016-2019

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Banda Aceh, 10 Maret 2021
Yang Menyatakan



RIDWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayat, dan Karuniya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh 2016-2019”**. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Pendidikan Stara Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

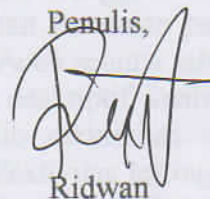
1. Ayahanda Tercinta Hamzah, dan Ibunda Tercinta Rosmiati, Kakak dan Adik-adik atas doa, bimbingan, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis yang selalu tercurah selama ini guna tercapainya cita-cita.
2. Bapak Dr.H. Aslam Nur, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Drs.Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku ketua jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Irmawati, SE.M.Si,AK dan bapak M.Fahriansyah, SE.M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan penelitian ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammdiyah Aceh khususnya staf pengajar pada jurusan akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman, sahabat yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan kami di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, atas semua dukungan, semangat, serta kerja samanya

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amiin. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021

Penulis,



Ridwan

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA BAGIAN PERTANIAN PADA DINAS PANGAN
PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2016-2019**

RIDWAN

1602110347

PEMBIMBING I : IRMAWATI, SE,M.SIAK

PEMBIMBING II :M.FAHRIANSYAH,SE,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, dengan objeknya adalah anggaran belanja instansi tersebut selama tahun anggaran 2016-2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja bagian Pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran bagian Pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh selama tahun 2016-2019. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan perhitungan rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan presentase 99.67% dan yang terendah pada tahun 2016 dengan presentase 91.86%. Anggaran belanja tahun 2016 sampai tahun 2019 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya terjadi penurunan dilihat dari segi persentasenya masih dalam kategori efektif. Tingkat efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan sudah berjalan dan sudah terealisasi. Pengelolaan anggaran belanja dikatakan sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu jika penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum. Anggaran belanja pada dinas DPPKP Kota Banda Aceh selama 2016 sampai tahun 2019 sudah sangat efisien.

Kata Kunci : Pelaksanaan Anggaran Belanja, Konsep Efektivitas, Konsep Efisiensi

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION
OF SHOPPING BUDGETS IN AGRICULTURAL FOOD DEPARTMENT OF SEA
FARMING AND FISHERIES IN BANDA ACEH CITY IN 2016-2019**

RIDWAN

1602110347

SUPERVISOR I : IRMAWATI, SE, M.SLAK

SUPERVISOR II : M.FAHRIANSYAH, SE, M.Si

ABSTRAK

This research was carried out in the Agriculture section of the Banda Aceh City Maritime and Fisheries Food Service, with the object being the agency's spending budget for the 2016-2019 fiscal year. The purpose of this study is to analyze how the effectiveness and efficiency of the implementation of the expenditure budget of the Agriculture section at the Department of Maritime Agriculture and Fisheries, Banda Aceh City. This study uses secondary data sources in the form of the Budget Realization Report of the Agriculture section of the Banda Aceh Marine Fisheries and Fisheries Food Service during 2016-2019. This type of research is a type of descriptive research, and uses the calculation of financial ratios, namely the ratio of effectiveness and efficiency ratios. The results showed that the highest level of effectiveness occurred in 2018 and the lowest in 2016. The 2016-2017 expenditure budget, and 2019 could be said to be effective, but in 2016 the level of effectiveness occurred decreased in terms of percentage but still in the category effective. The level of efficiency of the overall budget has been running and has been realized. Expenditure management budget is said to have met the efficiency requirements, namely if the use of minimum funds to achieve maximum results. The budget for the Banda Aceh City DPPKP office for 2016 to 2019 has been categorized as very efficient.

Keywords: Budget Implementation, Effectiveness Concept, Efficiency Concept

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Anggaran Sektor Publik	11
2.1.1 Pengertian Anggaran	11
2.1.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	17
2.1.3 Fungsi dan Prinsip Anggaran Sektor Publik.....	19
2.1.4 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik.....	12
2.2 Efektivitas dan Efisiensi Anggarna Belanja.....	20
2.2.1 Efektivitas	20
2.2.1.1 Pengertian Efektivitas	20
2.2.1.2 Pengukuran Efektivitas	21
2.2.2 Efisiensi	23
2.2.2.1 Pengertian Efisiensi	23
2.2.2.2 Pengukuran Efisiensi	25
2.3 Penelitian Terdahulu	25
2.4 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.1.1 Tujuan Penelitian	31
3.1.2 Jenis Penelitian	31
3.1.3 Horizon Waktu.....	32
3.1.4 Unit Analisis	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Metode Analisis Data.....	33
3.3.1 Analisis Efektivitas.....	34
3.3.2 Analisis Efisiensi	35

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2	Struktur Organisasi	38
4.3	Konsep Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh ...	41
4.3.1	Proses Penyusunan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	41
4.3.2	Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	50
4.4	Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	53
4.4.1	Tingkat efektivitas Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	53
4.4.2	Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	56
4.5	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	59
4.5.1	Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Bagian Pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	59
4.5.2	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	60
4.6	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan.....	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66

DAFTAR TABEL

1.1	Laporan Anggaran Dan Realisasi Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh	8
2.1	Kriteria Efektivitas	23
2.2	Kriteria Efisiensi	25
2.3	Penelitian Terdahulu	28
4.1	Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019.....	55
4.2	Kategori Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019.....	57
4.3	Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019.....	58
4.4	Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019.....	60
4.5	Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019.....	61

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran..... 30

4.2 Struktur Organisasi DPPKP..... 40

4.3 Siklus Penyusunan Anggaran 49

4.4 Keterkaitan Renja SKPD, Renstra Dan Dokumen Perencanaan
Lainnya 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan Bastian (2014:25). Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran Mardiasmo dalam Qurrata (2014:4)

Anggaran adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi pada pihak pemilik

organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik Wiratna (2015:28)

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah aloksi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan mengindikasikan target yang harus di capai oleh pemerintah , sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan Halim (2015 : 322).

Dana yang digunakan untuk anggaran sendiri di dapatkan melalui hasil dari daerah itu sendiri melalui retribusi, pajak bumi dan bangunan, pajak cukai, pajak penghasilan. Sehingga daerah maupun Negara bisa membuat anggaran untuk daerah maupun Negara dengan menggunakan dana yang dihasilkan tersebut. Maka dengan perancangan anggaran maka dana yang di hsailkan untuk daerah atau Negara bisa digunakan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat atau pun untuk pembangunan fasilitas umum yang merata.

Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan adalah sebuah kedinasan yang bertanggung jawab akan segala sesuatu yang menyangkut tentang pertanian pangan kelautan serta perikanan, untuk melakukan program maka dinas DPPKP harus membuat sebuah anggaran untuk belanja yang akan digunakan dalam satu periode atau untuk anggaran belanja pada satu tahun periode tersebut.

Adapun tugas yang merupakan kewajiban dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh ialah melaksanakan urusan pemerintah dan pembanguna di bidang, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan yang ada di daerah

kota banda aceh, semua pelaksanaan, perumusan, penyusunan, penataan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, penyelenggaraan, pemberian izin pemantauan, yang bersangkutan dengan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan yang ada di kota banda aceh merupakan tanggung jawab dari Dinas Pangan Pertanian Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh.

Pada perubahan pemerintah yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik telah merubah sebuah paradigma dalam sebuah anggaran di pemerintah daerah. Pada perubahan tersebut pemerintah daerah diberikan kekuasaan otonom yang membuat pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam melaksanakan anggaran dengan melibatkan langsung masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan anggaran yang ada.

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan diberbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintah dan juga perguruan tinggi. Kinerja juga masuk dalam setiap aspek sosial ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini terlihat dari banyaknya organisasi yang menyertakan kata kinerja dalam visi dan misinya. Dalam pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawan saja melainkan dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategis perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja

dengan rencana kerja serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dikarenakan sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Mardiasmo dalam Qurrata (2016:2)

Adanya Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemda tingkat kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong pemda untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMEDAGRI) No. 13 tahun 2006, efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisiensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMEDAGRI) No 13 tahun 2006 merupakan hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penganggaran barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu

Pengendalian keuangan sangat penting dilakukan oleh Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh yaitu supaya anggaran belanja yang di tetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam UU No.32/2004 juga disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan perda, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan bagi daerah dari dana hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan (DPPKP) adalah sebuah Dinas yang bertanggung jawab akan segala sesuatu yang menyangkut tentang pangan pertanian kelautan serta perikanan, untuk melakukan program maka dinas DPPKP harus membuat sebuah anggaran untuk belanja yang akan digunakan dalam satu periode atau untuk anggaran belanja pada satu tahun periode tersebut.

Sumber dana pemerintah yang bersumber dari sektor pembiayaan publik yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian diperlukan pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang lebih transparan, partisipatif, dan terukur. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Kota termasuk Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan diwajibkan menjalankan fungsi Pemerintah sesuai dengan target efisiensi masing-masing.

Penilaian efesiensi keuangan kota merupakan suatu penilaian terhadap kinerja suatu kota yang ditujukan untuk perkembangan pembangunan dan kesejahteraan kota tersebut. Penilaian dapat dilihat dari tingkat realisasi yang telah dilaksanakan. Fenomena realisasi itu terjadi karena manajemen instansi pemerintah yang kurang baik dan kemampuan SDM yang lemah serta kurangnya hubungan kerja sama antara pimpinan yang menyebabkan program pemerintah tidak terlaksana dengan baik sehingga adanya dana yang menganggur dan menyebabkan tidak maksimalnya pemerataan pertumbuhan pertanian serta berkurangnya peluang penyediaan tenaga kerja (pengangguran) yang akan menjadi dampak buruk pada roda ekonomi daerah.

Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan di Kota Banda Aceh sangatlah memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Banda Aceh, Banda Aceh merupakan daerah yang sangat berdekatan dengan pantai dan laut, tidak hanya itu Banda Aceh juga memiliki daratan yang mempunyai tanah yang subur, sehingga hampir sebagian penghasilan masyarakat Banda Aceh di dapatkan dari hasil pertanian, perikanan dan juga laut di sekitar Kota Banda Aceh, kebijakan yang akan diambil ataupun sudah di laksanakan DPPKP Kota Banda Aceh sangat penting bagi para pekerja yang berpenghasilan dari laut serta pertanian karena menyangkut kelangsungan hidup bagi sebagian masyarakat banda aceh itu sendiri, sehingga anggaran yang memiliki sasaran yang tepat jugak harus di barengi dengan ke efisiensi anggaran yang digunakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan yang merupakan nahkoda dalam menjalankan anggaran tersebut sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Banda Aceh serta dapat menghemat anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah sendiri.

Upaya penyiapan peningkatan fungsi pelayanan publik, dan pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan dimpenmentasikan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh menjadi tujuan dan sasaran yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kapasitas Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota banda aceh dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menunjukan sebuah anggaran serta realisasi belanja bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh pada 4 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, realisasinya cenderung mengalami kenaikan, pada anggaran tahun 2016 realisasi belanja lebih dibandingkan anggaran belanja yaitu 91,86 %,selanjutnya pada tahun 2017 realisasi anggaran meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 98,69 %, selanjutnya pada anggaran tahun 2018 realisasi anggaran kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 99,67%, dan pada tahun 2019 realisasi anggaran menurun dari tahun sebelumnya yaitu 93,02%.

Dari beberapa aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Nordiawan dan Ayuningtyas (2016:39). Berikut ini laporan realisasi dan anggaran Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh:

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Dan Realisasi Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan,
Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh
Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja	Jumlah Realisasi Belanja	Persentase %
2016	189.720.000	174.282.500	91.86%
2017	153.873.500	151.869.500	98.69%
2018	1.605.295.000	1.600.006.800	99.67%
2019	131.289.600	122.134.400	93.02%

Sumber dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh (2020)

Pengukuran efektivitas dan efisiensi anggaran belanja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan yang dalam penelitian ini terkait dengan anggaran pendapatan dan pendanaan. Beberapa diantara cara menghitung anggaran belanja, yaitu adalah dengan menghitung rasio efisiensi dan rasio efektivitas Mardiasmo dalam Qurrata (2016:7)

Maka untuk memaksimalkan anggaran yang ada dinas pertanian Kota Banda Aceh harus menggunakan anggaran yang sangat efektivitas dan efisiensi. Sehingga akan muncul program-program yang akan memajukan perkebunan dan pertanian di kota banda aceh sendiri, dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja pada oleh Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh khususnya bagian Pertanian tahun 2016-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh khususnya bagian Pertanian tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneitian ini diharapkan dapat member manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Pertanian Banda aceh

Sebagai gambaran dan masukan positif bagi Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh khususnya bagian Pertanian dalam pelaksanaan anggaran belanja sehingga bisa berjalan dengan efektivitas dan efesiensi dengan terealisasikan sesuai apa yang telah di anggarkan.

b. Bagi Peneliti dan Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai tingkat efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh tahun anggaran 2016-2019.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5 RuangLingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan pembahasan pada analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh khususnya bagian Pertanian. Anggaran yang di analisis dari tahun anggaran 2016 sampai 2019.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

1.1.1 Pengertian Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah, pengertian anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran menurut UU No 17 Tahun 2012 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara/daerah (pusat/daerah) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran tersebut setiap tahun diajukan Pemerintah pusat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

Prawieonegoro (2014:2) Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sangadji dalam jurnal Aries (2019 : 13) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi (pemasaran, produksi, dan keuangan). Anggaran merupakan cara bagaimana kita

mengetahui sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi rancangan yang akan ditujukan organisasi selama periode yang di anggarkan.

Bastian (2014:25) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

a. Fungsi Anggaran

Menurut Rudianto (2013:5) menjelaskan bahwa anggaran mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1) Anggaran sebagai alat perencanaan.

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang akan butuh, dan beberapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian.

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah, tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai alat politik.

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dan publik membutuhkan *political will, coalition building*, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

5) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.

Anggaran merupakan wujud komitmen dan *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian.

6) Anggaran sebagai alat motivasi.

Anggaran sebagai instrument untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomi efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan agar dapat memotivasi, anggaran hendaknya bersifat *Challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah, sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

7) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

b. Karakteristik Anggaran

Dalam pembuatan anggaran baik itu keuangan ataupun operasional harus memiliki karakteristik anggaran yang baik agar memiliki hasil yang baik juga. Menurut Mulyadi (2016 : 490) menyatakan bahwa karakteristik anggaran yang baik diantaranya sebagai berikut:

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- 3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- 4) Usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penusunan anggaran.
- 5) Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dibawah koordinasi tertentu.
- 6) Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan.

c. Tujuan Penyusunan Anggaran

Nafarian dalam jurnal Aries (2019 : 13) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan disusunnya anggaran antara lain :

- 1) Digunakan sebagai landasan yuridis formula dalam memilih sumber dan investasi dana.
- 2) Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- 3) Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan.

- 4) Merasionalkan sumber dana investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 5) Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penyusunan anggaran membantu pemerintah dalam melaksanakan tujuan fiscal serta menciptakan efisiensi memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, dan meningkatkan transparansi dan pertanggung jawabanya.

d. Manfaat Penganggaran

Beberapa manfaat disusunnya anggaran menurut Gunawan (2008 : 32) yaitu:

- 1) Mendorong setiap individu di dalam perusahaan untuk berpikir ke depan.
- 2) Mendorong terjadinya kerjasama antara masing-masing bagian karena masing-masing menyadari bahwa mereka tidak dapat berdiri sendiri.
- 3) Mendorong adanya pelaksanaan atas partisipasi karena setiap bagian terlihat untuk ikuti serta memikirkan rencana kerjanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa manfaat dari penganggaran sebagai aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, alat pengendali kerja dan alat motivasi tindakan efisien dalam pencapaian visi pemerintah.

e. Pentingnya Anggaran

Mardiasmo (2016 : 120) menjelaskan bahwa anggaran penting karena beberapa alasan yaitu:

- 1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintahan untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya pilihan, dan *trade off*.
- 3) Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran public merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga- lembaga publik yang ada.

f. Jenis-jenis Anggaran

Ada jenis-jenis Anggaran Belanja Daerah Menurut Permendagri 13 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang Dan Jasa
- c) Belanja Modal

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Bunga
- c) Belanja Subsidi

- d) Belanja Hibah
- e) Bantuan Sosial
- f) Belanja Bagi Hasil
- g) Bantuan Keuangan
- h) Belanja Tidak Terduga

2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang-barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dalam program kerja dalam sebuah anggaran.

Bastian (2013:69) mendefinisikan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Sedangkan Mardiasmo (2013:57) mendefinisikan anggaran sektor publik adalah instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik berarti proses pelaksanaan program-program dalam bentuk pendapatan dan belanja yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang masyarakat.

2.1.2 Fungsi dan Prinsip Anggaran Sektor publik

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran menjadi kendali dan tolak ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan. *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*

yang dikutip oleh Haruman (2013:11), mengemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran merupakan alat motivasi dan persuasi tindakan efektif efisien dalam mencapai visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrument politik.
7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal

Sedangkan prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2013:60) meliputi :

1. Otorisasi oleh legislatif, yaitu anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif, yaitu anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
3. Kebutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
4. *Nondiscretionary appropriation*, yaitu jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisiensi.
5. Periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang periodic, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
6. Akurat, yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadang yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.
7. Jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
8. Diketahui publik, yaitu anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Dari beberapa fungsi dan prinsip anggaran sektor publik diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja, selain itu anggaran sektor publik juga menjadi suatu alat komunikasi intern dan pengendali unit kerja. Dan prinsip anggaran sektor publik yaitu haruslah teortorisasi, komprehensif, utuh, termanfaatkan, periodik, akurat, jelas dan diketahui publik

2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2013:67) proses penyusunan anggaran sektor publik mempunyai prinsip-prinsip pokok sebagai berikut :

1. Tahap persiapan anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap ratifikasi

Tahap ini merupakan yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesmanship* dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam

tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap pelaksanaan anggaran.

Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya system informasi akuntansi dan system pengendalian manajemen.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

2.2 Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja

2.2.1 Efektivitas

2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Mahmudi (2015:86) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengertian

efektivitas menurut Jhon (2016:76) adalah pencapaian target keluaran (*output*) yang akan diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran atau *output* (seharusnya) dengan *output* realisasi atau *output* (sesungguhnya). Jika $OA > OS$ maka akan disebut dengan efektif. Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transpormasi Pelayanan Publik “ Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas atau fungsi (oprasional kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya” (Kurniawan 2015:109).

Menurut Mardiasmo (2014:32) pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorintasikan pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) melalui ukuran efektivitas. Mardiasmi (2014:134) juga menambahkan efektivitas juga umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam, tergantung dari pada sasaran atau tujuan yang diinginkan di capai atau yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

2.2.1.2. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan

efektif apabila suatu rasio yang dicapai mencapai 100%.Namun, demikian semakin tinggi ratio efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Mahmudi (2013:164)

Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya.Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target pendapatan sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belnaha. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja. Halim (2015:120)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realsai Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2015)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas

Persentase efisiensi	Kemampuan keuangan
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber :Kepmendegritahun 1996 No 690.900.327

2.2.2 Efisiensi

2.2.2.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan Murni (2014:6). Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input Trianto (2015:5). Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Analisis Efisiensi sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh

organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan cara yaitu :

1. Menaikkan output untuk input yang sama,
2. Menaikkan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input
3. Menurunkan input untuk output yang sama.

Antony dalam Aries (2019 : 9) mendefinisikan efisiensi sebagai rasio output terhadap input atau jumlah output perunit. Dalam beberapa sebuah organisasi biasanya diukur dengan cara melakukan perbandingan biaya actual dengan sebuah standar , dimana biaya tersebut harus dinyatakan didalam output yang diukur.

Efisiensi juga merupakan hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang digunakan Dedi dkk dalam Imanuel (2015 : 34). Sedangkan Indra (2006: 78) juga menjelaskan bahwa efisiensi adalah input yang tersedia mampu menghasilkan output pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat. Mardiasmo (2009: 132) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan output yang dapat di capai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Perbedaan antara efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan

berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang benar tersebut. Menurut Mahsun dalam sumenge (2013:110).

2.2.2.2 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja, berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realsai Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2015)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman dan Penilaian dan Kinerja Keuangan untuk melihat tingkat efisiensi anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Persentase efisiensi	Kemampuan keuangan
Diatas 100%	Tidak efisien
90 – 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat efisien

Sumber :Kepmendegritahun 1996 No 690.900.327

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam membuat sebuah penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam

menganalisis penelitian yang sedang dilakukan, pada penelitian terdahulu ada beberapa judul yang memiliki variabel yang sama seperti variabel yang digunakan oleh penulis sehingga bisa menjadi refresiensi bagi penulis untuk menjadi bahan kajian untuk penelitian ini, Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis.

Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan efisiensi anggaran belanja diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nofita S, Sri Mintarti, Salmah Pattisahusiwa (2018) dengan judul analisis efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja kota samarinda tahun 2011 -2015 dengan hasil penelitian menunjukan dimana tingkat efektifitas anggaran belanja kurang efektif sementara efesiensi anggaran belanja yang dilakukan oleh kota samarinda sudah memenuhi dana yang minimum untuk mencapai hasil yang angat efesien.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Anita Widiyana. (2016) dengan judul Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan pemuda Dan Olahraga Kota Palembang dengan hasil penelitian perhitungan tahun 2011 sebesar 91,79% tahun 2012 sebesar 95,00%, tahun 2013 sebesar 93,01%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan pada tahun 2014 kineijanya cukup efektif karena hasil yang dicapai hanya sebesar 87,31%. Sementara Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja pada tahun 2011 sebesar 19,38%, pada tahun 2012 tingkat efisiensi realisasi belanja lansung dan realisasi belanja adalah 20,36%, pada tahun 2013 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja

sebesar 19,38% , pada tahun 2014 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasibelanja sebesar 13,55%.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Andre P Tulangow dan Treesje Runtu, (2016) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa, Hasil Penelitian dalam penelitian ini bahwa Realisasi Kinerja Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians tahun 2013-2015 dapat dikatakan kurang baik, karena realisasinya tidak mencapai jumlah yang dianggarkan dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa masih sangat rendah. Sedangkan realisasi kinerja belanja pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari analisis varians secara umum dapat dikatakan baik karena tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan.

Penelitian yang dilakukan Asita Widiyana (2016) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota Palembang. Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Palembang Metode penelitian yaitu deskriptif. Hasil penelitian untuk perhitungan mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja setiap tahunnya kriteria efektif dan cukup efektif yaitu untuk tahun 2011, 2012, 2013 mencapai kriteria efektif. Sedangkan untuk tahun 2014 mencapai kriteria cukup efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Basriah (2017) yang berjudul analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada badan

pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa (bpmd) daerah provinsi Sulawesi tengah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada BPMD tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara efektif. Rasio efisiensi yang dilakukan selama tahun penelitian menunjukkan rata-rata pengelolaan anggaran belanja cukup efisien.

penelitian dalam bentuk tabel 2.3 :

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja kota samarinda tahun 2011 - 2015, Dwi Nofita S, Sri Mintarti, Salmah Pattisahusiwa (2018)	Analisis kualitatif	hasil penelitian menunjukan dimana tingkat efektivitas anggaran belanja kurang efektif sementara efisiensi anggaran belanja yang dilakukan oleh kota samarinda sudah memenuhi dana yang minimum untuk mencapai hasil yang angat efisien. Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2011 sebesar 91,79% tahun 2012 sebesar 95,00%, tahun 2013 sebesar 93,01%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja	Sama sama melakukan penelitian tingkat efisiensi	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian tingkat efektivitas sementara penelitian sekarang tidak melakukan penelitian efektivitas, tempat penelitian
2	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan pemuda Dan Olahraga Kota Palembang dengan hasil penelitian perhitungan tahun 2011, Anita Widiyana. (2016)	Analisis kualitatif	Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan pada tahun 2014	Sama sama melakukan penelitian tingkat efisiensi	Tempat penelitian, objek penelitian dan waktu penelitian

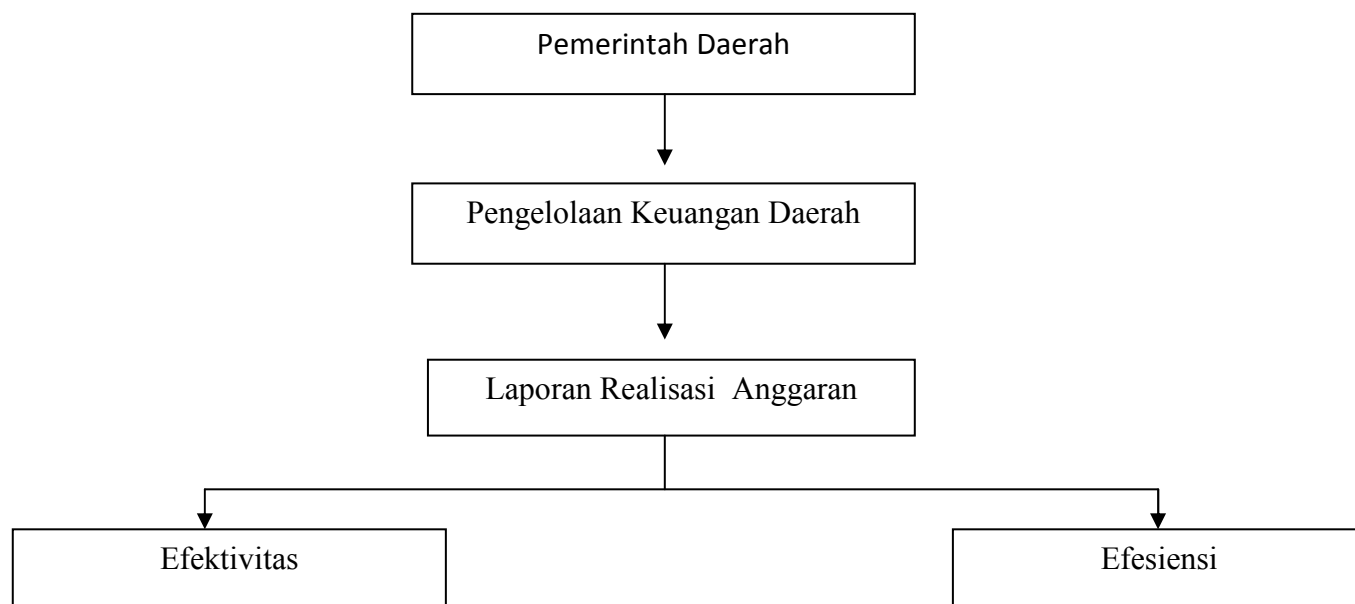
No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kineijanya cukup efektif karena hasil yang dicapai hanya sebesar 87,31%.		
3	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa, Andre P Tulangow dan Treesje Runtu (2016)	Analisis kualitatif.	Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa Realisasi Kinerja Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari sisi pendapatan,	meneliti tentang tingkat anggaran di pemerintah	Tempat penelitian, objek penelitian dan waktu penelitian
4	Analisis efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota Palembang, Asita Widiyana (2016)	Deskriptif	Tingkat efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja sudah maksimal dan kinerja dinas pendidikan dan pemuda olahraga sudah berhasil berdasarkan pengukuran dari tingkat efektivitas dan efesiensi dinas pemuda dan olahraga kota Palembang	Sama sama melakukan penelitian tingkat efesiensi	Tempat penelitian, objek penelitian dan waktu penelitian
5	Analisis efektif dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa (BPMD) daerah provinsi Sulawesi tengah. Basarinya (2017)	Deskriptif	Tingkat dan kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran pada BPMD tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara efektif	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan rasio efektivitas dan efisien	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yaitu dilakukan pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa (BPMD) daerah provinsi Sulawesi,

2.4 Kerangka Pemikiran

Efektif dan efisien anggaran belanja dimulai dari laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang

indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, lalu dianalisis melalui rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Kerangka pemikiran “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2018” dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2009 : 15) menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya satu variable atau lebih. Penelitian dekskriptif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang telah terjadi atau pun yang sedang berlangsung. Maka penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif karena pembahasan yang akan diteliti bersifat variable mandiri tanpa perbandingan adanya hubungan antara variable satu dengan yang lainnya.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh khususnyabagian Pertanian tahun 2016-2019.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan menggunakan perhitungan rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi yaitu digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian Anggaran Belanja pada tahun 2016-2019.

3.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan adalah studi *time series*, yaitu studi yang lebih menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini dilakukan pada tingkat pemerintah yaitu Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh yang bertempat di Jalan Tgk. Dikandang No.31 A Gp. Pande Kota Banda Aceh.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik penumpulan yang digunakan adalah:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1. Wawancara

Secara garis besar ada dua macam wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena mewawancarai dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden tentang garis besar objek penelitian saja tidak secara lengkap menyeluruh (detail). Sugiyono (2012: 197) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini mengadakan Tanya jawab dengan staf

bidang keuangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:132), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumentasi juga dapat berupa gambar yang berhubungan dengan penelitian, dengan dokumentasi dapat membantu peneliti menyesuaikan antara kesesuaian data dengan kenyataannya.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah:

1. Mempelajari pos-pos anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
2. Mengadakan tanya jawab dengan manajemen/pejabat Pemerintah Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
3. Mempelajari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
4. Mempelajari cara penyusunan anggaran belanja yang baik dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
5. Mengolah dan menghitung rasio efektivitas dan efisiensi antara penyusunan anggaran pendapatan dengan anggaran belanja pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Sugiono (2009:206) mendefinisikan analisis deskriptif sebagai

statistic yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam hal ini yang akan dianalisis adalah efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja tahun pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh 2016-2019.

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Kuncoro (2013:145) menyatakan jenis data dapat dibedakan menjadi data primer sekunder kuantitatif dan kualitatif.

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric (angka). Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut.

3.3.1 Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja (Halim, 2015). Adapun rumus rasio efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2015)

Berdasarkan rumus di atas, apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja mencapai 90% sampai dengan 100% maka anggaran belanja dikatakan efektif atau dengan kata lain semakin besar persentase perbandingannya maka anggaran belanja dianggap semakin efektif.

Sebaliknya, apabila persentase perbandingannya semakin kecil maka anggaran belanja di anggap tidak efektif.

3.3.2 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja (Halim, 2015). Rasio efisiensi dapat dihitung dengan :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realsai Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2015)

Berdasarkan rumus diatas, apabila perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja mencapai 90% sampai dengan 100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien atau dengan kata lain semakin besar persentase perbandingannya maka anggaran belanja semakin di anngap semakin kurang efisien. Sebaliknya, apabila persentase perbandingannya semakin kecil maka anggaran belanja dianggap semakin efisien.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan adalah suatu Dinas yang bertanggung jawab akan segala sesuatu yang menyangkut tentang pangan pertanian kelautan serta perikanan, untuk melakukan program maka dinas DPPKP harus membuat sebuah anggaran untuk belanja yang akan digunakan dalam satu periode atau untuk anggaran belanja pada satu tahun periode tersebut.

Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan di Kota Banda aceh sangatlah memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Banda Aceh, Banda Aceh merupakan daerah yang sangat berdekatan dengan pantai dan laut, tidak hanya itu Banda Aceh juga memiliki daratan yang mempunyai tanah yang subur, sehingga hampir sebagian penghasilan masyarakat Banda Aceh di dapatkan dari hasil pertanian, perikanan dan jugak laut di sekitar kota banda aceh, kebijakan yang akan diambil ataupun sudah di laksanakan DPPKP Kota Banda Aceh sangat penting bagi para pekerja yang berpenghasilan dari laut serta pertanian karena menyangkut kelangsungan hidup bagi sebagian masyarakat banda aceh itu sendiri, sehingga anggaran yang dibuat harus menuju pada titik permasalahan pada bagian pertanian, pangan, maupun perikanan, anggaran yang memiliki sasaran yang tepat jugak harus di barengi dengan ke efisiensi anggaran yang digunakan Oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan yang merupakan nahkoda dalam menjalankan

anggaran tersebut sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat banda aceh serta dapat menghemat anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah sendiri.

Adapun tugas yang merupakan kewajiban dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh ialah melaksanakan urusan Pemerintah dan Pembanguna di Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang ada di daerah Kota Banda Aceh, semua pelaksanaan, perumusan, penyusunan, penataan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, penyelenggaraan, pemberian izin pemantauan, yang bersangkutan dengan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan yang ada di Kota Banda Aceh merupakan tanggung jawab dari Dinas DPPKP Kota Banda Aceh.

Visi Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh adalah “Mewujudkan Pelayanan Maksimal Kepada Masyarakat Dalam Urusan Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan”. Sedangkan Misi Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Adalah :

1. Melaksanakan Tertib Administrasi.
2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana.
3. Mengembangkan Sistim Pelayanan Berbasis Tehnologi.
4. Meningkatkan Kualitas Serta Kemampuan Aparatur Pelayanan.

Dalam implementasi visi dan misi Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh tersebut sangat dibutuhkan adanya data dan informasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah perlu

dilakukan penataan terhadap satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kota banda aceh.

1.2 Struktur Organisasi

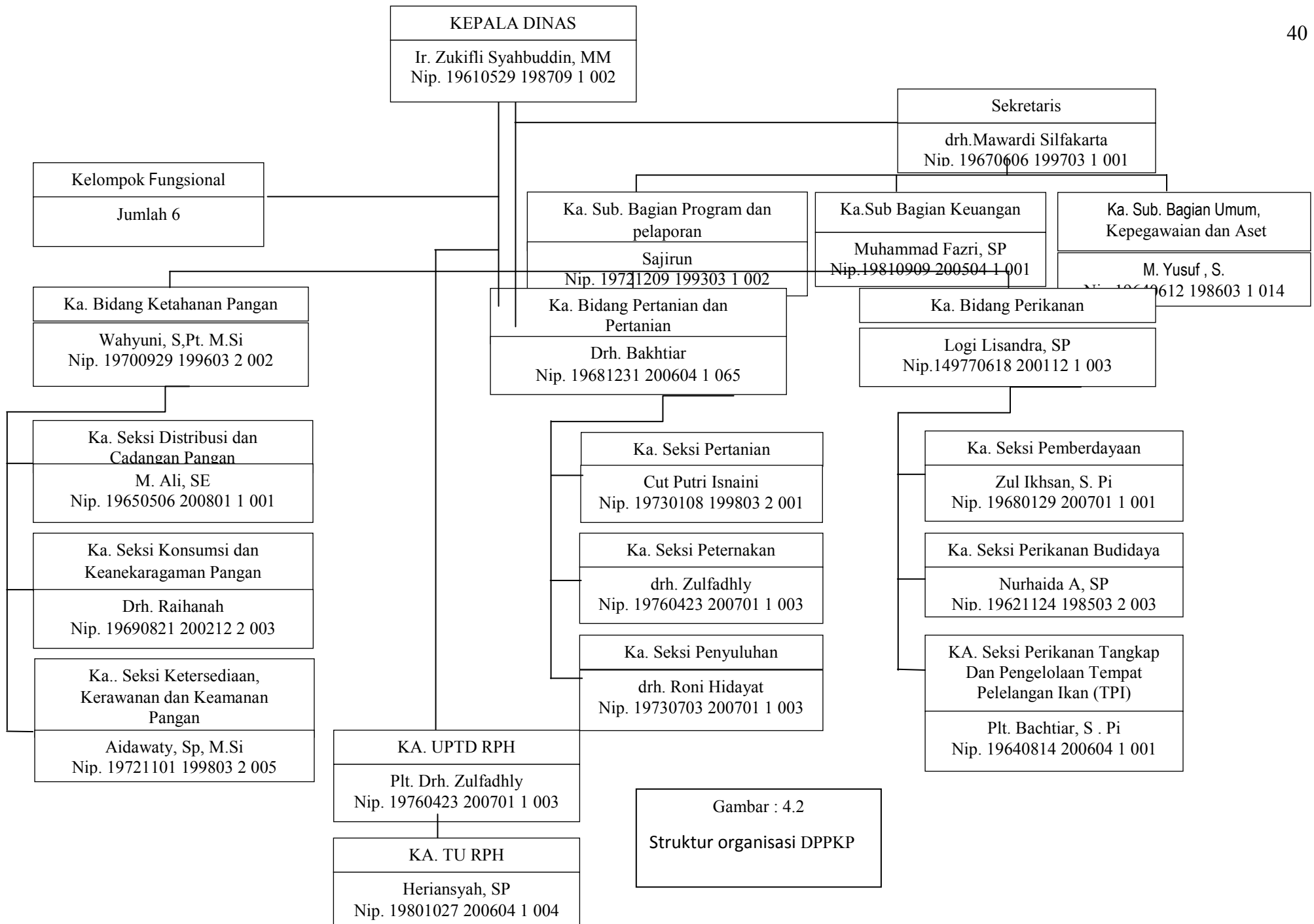
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh merupakan perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pertanian. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banda Aceh.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1(satu) orang Sekretaris, 3(tiga) orang Kepala Bidang, 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian, 9(Sembilan) orang Kepala seksi serta, 1(satu) orang Kepala UPTD RPH. Selain itu ada kelompok jabatan fungsional yang berfungsi pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha bidang pertanian, kelautan dan perikanan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan.

3. Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - b. Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan.
 - c. Seksi Ketersedian, Kerawanan dan Keamanan Pangan.
4. Bidang Pertanian
 - a. Seksi Pertanian
 - b. Seksi Perternakan
 - c. Seksi Penyuluhan
5. Bidang Perikanan
 - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan
 - b. Seksi Perikanan Budidaya
 - c. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)
6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Rumah potong Hewan Terpadu, membawahi Sub Tata Usaha.



1.3 Konsep Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

1.3.1 Proses Penyusunan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Berdasarkan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran walikota tentang pedoman penyusunan Rencanana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD. Berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan Surat Edaran Walikota yang didalamnya memuat Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah memulai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun rancangan APBD. Rancangan APBD yang disusun, merupakan kumpulan dari usulan-usulan yang telah disusun dan diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pejabat pengelola keuangan daerah dalam lingkungan pemerintah daerah yang dituangkan dalam masing-masing Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Pembuatan Rencana Kerja Anggaran pada SKDP dimulai pada bulan Juni-Juli dan Selesai pada bulan November-Desember atau disebut juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1. Pelaksanaan dan Pihak Terkait Dalam Penyusunan RKA-SKPD

a. Walikota

Walikota mengotorisasi Rancangan Surat Edaran (SE) Walikota menjadi SE walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran belanja

b. Sekda

1. Sekda menyetujui rancangan awal SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD serta meneruskan kepada Walikota.
2. Sekda mengkoordinasi penyebaran SE Walikota tentang pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD-SKPD.

c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

1. TAPD rancangan awal SE Walikota Banda Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada Sekda.
2. TAPD membahas RKA-SKPD untuk melihat kesesuaian RKA-SKPD dengan RKPD, Renja SKPD, KU APBD, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada RKA-SKPD tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya. Hasil pembahasan menjadi bahan lampiran Rancangan Peraturan Daerah APBD.
3. Dalam hasil pembahasan RKA-SKPD yang telah dilakukan TAPD terdapat ketidaksesuaian, maka RKA-SKPD dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan, untuk perbaikan atau penyempurnaan.
4. TAPD menyerahkan seluruh dokumen RKA-SKPD hasil penyempurnaan RKA-SKPD.

d. Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

1. SKPD menerima SE Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

2. Kepada SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD berdasarkan Kebijakan Umum APBD serta pedoman penyusunan RKA-SKPD. Penyusunannya mencakup
 - a. SKPD menyusun rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 1. Form RKA-SKPD 1 disiapkan hanya oleh SKPD pemungut pendapatan.
 - b. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD.
 - c. SKPD menyusun rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD.
 - d. SKPD mengkompilasi dokumen RKA-SKPD di atas menjadi RKA-SKPD.
 - e. Kepala SKPD melakukan penyempurnaan RKA-SKPD (kalau terjadi ketidaksesuaian RKA-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya), menyampaikan kepada TAPD.
- e. Pejabat Pengeola Keuangan Daerah (PPKD)
 1. PPKD menerima seluruh dokumen RKA-SKPD dari SKPD untuk proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Penjabaran APBD.

2. Dokumen RKA-SKPD yang telah diterima oleh PPKD dan Dokumen RKA-PPKD yang telah disusun, disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.
3. Menerima kembali dokumen SKPD dan hasil pembahasan TAPD dan perbaikan SKPD.

2. Dokumen dan data yang diperlukan untuk penyusunan RKA-SKPD

Sebagai langkah awal penyusunan rancangan peraturan daerah APBD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan awal Surat Edaran (SE) Walikota Banda Aceh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan pedoman tersebut mengacu pada nota kesepakatan KUA dan PPAS yang telah disepakati serta dokumen-dokumen pendukung lain seperti analisis standar belanja. Secara rinci, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, substansi rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :

- a. Prioritas pembangunan daerah dan pedoman atau kegiatan yang terkait.
- b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program atau kegiatan SKPD.
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD.
- d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS, analisis standar belanja, dan standar satuan harga

Selain itu diperlukan daftar program dan kegiatan yang akan digunakan pada setiap SKPD (non urusan) dan daftar program dan kegiatan per urusan per bidang yang akan digunakan SKPD dalam penyusunan RKA untuk menjamin keseragaman

dan menghindari adanya duplikasi kegiatan yang sama baik dalam nama maupun substansi isinya. Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan anggaran RKA-SKPD disampaikan kepada skpd paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Selain SE Walikota juga diperlukan kode dan klasifikasi urusan pemerintah daerah dan organisasi, kode dan klasifikasi belanja dan struktur dan kode.

Dokumen KAU yang dilampirkan Surat Edaran Walikota memuat antara lain:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah,
- b. Asumsi penyusunan APBD,
- c. Kebijakan pendapatan daerah,
- d. Kebijakan belanja daerah,
- e. Kebijakan pembiayaan daerah,
- f. Strategi pencapaian.

Sedangkan PPAS yang dilampirkan oleh SE Walikota memuat antara lain:

- a. Penentuan skala prioritas pembangunan daerah,
- b. Penentuan skala prioritas program masing-masing urusan,
- c. Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program atau kegiatan.

3. Langkah-langkah teknis penyusunan anggaran RKA-SKPD

Langkah 1 : Persiapan pedoman penyusunan RKA-SKPD.

- a. TAPD menyerahkan rancangan awal SE Walikota Banda Aceh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada Sekda.
- b. Sekda menyetujui rancangan awal SE Walikota tentang pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan meneruskannya kepada Walikota.

- c. Walikota mengotorisasi rancangan SE Walikota menjadi SE Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD paling lambat awal bulan agustus tahun anggaran berjalan.
- d. Sekda mengkoordinasi penyebaran SE Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD-SKPD.

Langkah 2 : Penyusunan RKA-SKPD serta RKA lanjutan Pemerintah Kota Banda Aceh.

- a. SKPD menerima SE Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- b. SKPD mulai menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) masing-masing, berdasarkan SE Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.
 - 1. Dokumen RKA-SKPD memuat rencana pendapatan , rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, yang dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya terdiri dari :
 - a. RKA- SKPD (ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah)
 - b. RKA-SKPD 1 (rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah)
 - c. RKA-SKPD 2.1 (rincian anggaran tidak langsung satuan kerja perangkat daerah)

- d. RKA-SKPD 2.2 (rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan satuan kerja pemerintah)
 - e. RKA-SKPD 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah)
- 2. Dokumen RKA-SKPD disusun oleh masing-masing SKPD berpedoman pada surat edaran walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- 3. Dokumen SKA-SKPD yang disusun sesuai dengan urutannya.
- c. Setelah kepala SKPD menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik maupun keuangan kemudian menyusun RKA lanjutan yang berisi:
 - 1. Saldo DPA tahun awal penganggaran.
 - 2. Keterangan penyebab tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.
 - 3. Jumlah belanja yang telah direalisasi di tahun pertama.
 - 4. Jumlah anggaran yang dilanjutkan di tahun kedua.
- d. Penyampaian seluruh dokumen RKA-SKPD dan RKA-L kepada PPKD dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD.

- e. Form RKA-SKPD dan RKA-L yang telah disusun oleh masing-masing SKPD ditandatangani oleh kepala SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah).
- f. Dokumen RKA-SKPD dan RKA-L yang telah diterima oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.

Langkah 3 : Pembahasan RKA dengan Tim anggaran pemerintah daerah

- a. RKA-SKPD, RKA-L yang telah disusun oleh masing-masing organisasi satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada PPKD. RKA-SKPD dan RKA-L kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menelaah :
 1. Kesesuaian RKA-SKPD, RKA-L dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD dan RKA-PPKD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya.
 2. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga.
 3. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal.
 4. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.
 5. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

Langkah rinci pembahasan yang dilakukan TAPD diatur dalam surat keputusan Walikota tentang penunjukan/pengangkatan TAPD beserta uraian tugas nya.

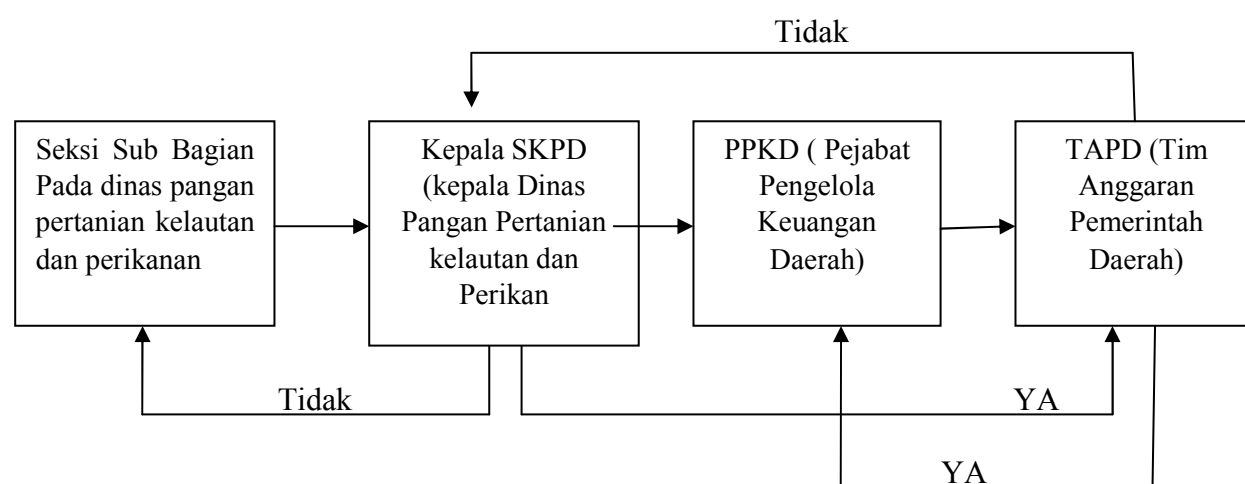
b. Penyempurnaan RKA-SKPD dan RKA-L

Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD dan RKA-L oleh TAPD terdapat ketidak sessuaian atau kesalahan, maka RKA-SKPD dan RKA-L dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan, untuk penyempurnaan RKA-SKPD dilakukan oleh staf SKPD yang ditunjukan untuk menyusun RKA-SKPD.

c. Kepala SKPD setelah melakukan penyempurnaan RKA-SKPD, RKA-L menyampaikannya kembali kepada TAPD.

d. TAPD menyerahkan seluruh dokumen RKA-SKPD, SKA-L dan RKA-PPKD hasil penyempurnaan kepada PPKD.

e. Seluruh dokumen RKA-SKPD dan RKA-L yang akan disampaikan kepada PPKD tersebut sudah ditandatangani oleh kepala SKPD dan mendapatkan paraf dan pengesahan dari TAPD dalam form RKA-SKPD dan RKA-L yang tersedia.



Gambar : 4.3
Siklus Penyusunan Anggaran Belanja

Keterangan :

1. Pada bulan Juni-Juli Sub Bagian pada Dinas Pertanian melakukan penyusunan anggaran belanja dan lalu diserahkan kepada kepala Dinas.
2. Kepada SKPD atau Kepala Dinas Pertanian menyerahkan RKA-SKPD kepada PPKD.
3. RKA-SKPD yang diterima oleh PPKD lalu diserahkan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.
4. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan maka RKA-SKPD dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk diperbaiki.
5. Kepala Dinas Pertanian mengembalikan RKA-SKPD kepada Sub Bagian untuk diperbaiki dan disempurnakan.
6. Setelah disempurnakan Sub Bagian menyerahkan lagi kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya kembali diberikan kepada TAPD.
7. TAPD menyerahkan seluruh dokumen RKA-SKPD dan RKA-L hasil penyempurnaan kepada PPKD dan sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan mendapatkan paraf pengesahan dari TAPD.
8. Proses penyusunan anggaran belanja selesai pada bulan November-Desember atau disebut juga DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

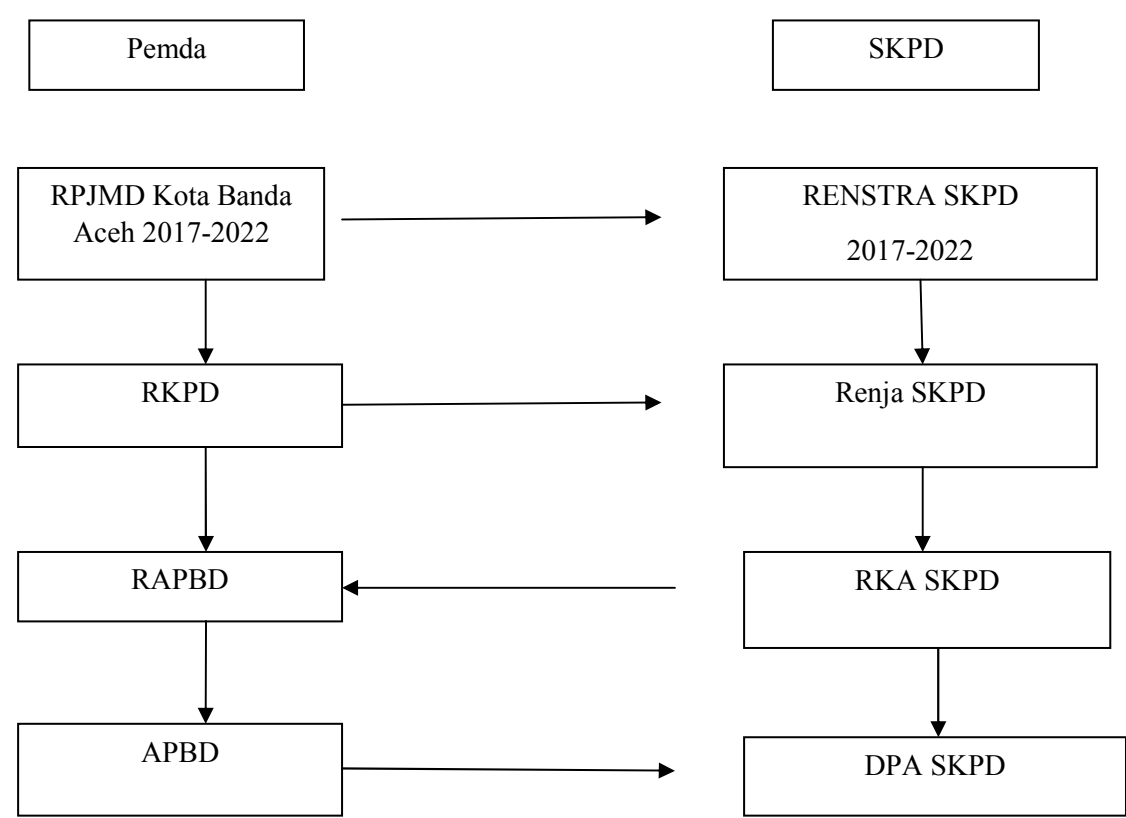
1.3.2 Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Banda Aceh Tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan

untuk mengetahui anggaran belanja di setiap kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Kerja Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Banda Aceh. Rencana Kerja Kementerian Negara atau Lembaga (Renja-KL) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 dan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada.

RPJMD tersebut bagi Dinas Pertanian akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra Dinas Pertanian. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banda Aceh, sedangkan bagi Dinas Pertanian, RKPD ini akan dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian. Berdasarkan Renja Dinas Pertanian disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD. Skema Keterkaitan Antara Renja SKPD, Renstra dan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 4.4
Keterkaitan Renja SKPD, Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan tersusunnya Rencana Kerja - SKPD Dinas Pertanian Kota Banda Aceh Tahun 2019, maka diharapkan Penyusunan Laporan Akuntabiliitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih obyektif karena rencana tingkat capaian (target) kegiatan telah ditetapkan pada awal tahun kerja. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja - SKPD ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Banda Aceh dan dapat bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana tingkat capaian (target).

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perlu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang diberikan oleh instansi teknis di atasnya.
2. Perlu adanya penyusunan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut juga diperlukan apabila ketersediaan anggaran terbatas, sehingga kegiatan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat lebih diutamakan.
3. Perlu memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas dalam menggunakan anggaran yang ada.

4.4 Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

4.4.1 Tingkat efektivitas Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Efektivitas dapat dikatakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang ditentukan di dalam setiap organisasi swasta maupun pemerintah. Kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapainya tujuan seperti yang telah ditentukan.

Setiap pekerjaan pegawai dalam pemerintahan sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan pemerintah dan memberikan hasil yang bermanfaat. Untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai organisasi pemerintah perlu dilakukan pengukuran efektifitas atau analisis efektifitas.

Efektifitas terhadap anggaran belanja bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Besarnya tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realsai Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2015)

1. Efektivitas tahun 2016

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = \frac{\text{Rp. 174.282.500}}{\text{Rp. 189.720.000}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = 0,9186 \times 100$$

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = 91.86 \%$$

2. Efektivitas tahun 2017

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = \frac{\text{Rp. 151.869.500}}{\text{Rp. 153.873.500}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = 0,9869 \times 100$$

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = 98.69 \%$$

3. Efektivitas tahun 2018

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = \frac{\text{Rp. 1.600.006.800}}{\text{Rp. 1.605.295.000}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = 0,9967 \times 100$$

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = 99.67\%$$

4. Efektivitas tahun 2019

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = \frac{\text{Rp. 122.134.400}}{\text{Rp. 131.289.600}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = 0,9302 \times 100$$

$$\text{Efektivitas Total Belanja} = 93.02\%$$

Tabel 4.1
Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas
Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh
Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja	Jumlah Realisasi Belanja	Persentase %	Kriteria
2016	189.720.000	174.282.500	91.86%	Efektif
2017	153.873.500	151.869.500	98.69%	Efektif
2018	1.605.295.000	1.600.006.800	99.67%	Efektif
2019	131.289.600	122.134.400	93.02%	Efektif

Sumber dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan Tabel 4.1 dijelaskan bahwa selama periode anggaran tahun 2016-2019 tingkat efektivitas anggaran belanja meningkat dari tahun ke tahun, tingkat efektivitas pada realisasi anggaran dan jumlah anggaran menunjukkan pencapaiannya di atas 90% sehingga dinilai efektif. Pada anggaran tahun 2016 realisasinya lebih dibandingkan anggaran belanja yaitu 91,86%, selanjutnya pada tahun 2017 realisasi anggaran meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 98.69%, selanjutnya pada anggaran tahun 2018 realisasi anggaran kembali meningkat dari

tahun sebelumnya 99,67%, dan pada anggaran tahun 2019 realisasi anggaran kembali menurun dari tahun sebelumnya 93.02%

4.4.2 Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi sebagai hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penganggaran barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Efisiensi dapat diartikan sebagai melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar (*doing rhings right*).

Efisiensi terhadap anggaran belanja bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi total belanja anggaran belanja. Besarnya tingkat efisiensi anggaran belanja bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dapat di lihat pada penjelasan di bawah ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realsai Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber :Mashun (2009)

Tabel 4.2
Kategori Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian
Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Belanja Tidak Langsung	163.456.500	120.409.000	1.174.004.850	71.200.800
Belanja Langsung	10.826.000	31.454.500	426.001.950	50.933.600
Jumlah Belanja	174.282.500	151.869.500	1.600.006.800	122.134.400
Persentase	60.21%	20,71%	26,62%	71.53%

Sumber dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh (2020)

1. Efisiensi Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Total Belanja} &= \frac{\text{Rp } 10.826.000}{\text{Rp } 174.282.500} \times 100\% \\ \text{Efisiensi Total Belanja} &= 0,0621 \times 100 \\ \text{Efisiensi Total Belanja} &= 60.21\%\end{aligned}$$

2. Efisiensi Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Total Belanja} &= \frac{\text{Rp } 31.454.500}{151.869.500} \times 100\% \\ \text{Efisiensi Total Belanja} &= 0.2071 \times 100 \\ \text{Efisiensi Total Belanja} &= 20,71\%\end{aligned}$$

3. Efisiensi Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Total Belanja} &= \frac{\text{Rp } 426.001.950}{\text{Rp } 1.600.006.800} \times 100\% \\ \text{Efisiensi Total Belanja} &= 0,2662 \times 100 \\ \text{Efisiensi Total Belanja} &= 26,62\%\end{aligned}$$

4. Efisiensi Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Total Belanja} &= \frac{\text{Rp } 50.933.600}{\text{Rp } 71.200.800} \times 100\% \\ \text{Efisiensi Total Belanja} &= 0,7153 \times 100 \\ \text{Efisiensi Total Belanja} &= 71.53\%\end{aligned}$$

Tabel 4.3
Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan
Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Belanja langsung	Jumlah Realisasi Belanja	Persentase %	Kriteria
2016	10.826.000	174.282.500	60.21%	Efisien
2017	31.454.500	151.869.500	20.71%	Sangat Efisien
2018	426.001.950	1.600.006.800	26.62%	Sangat Efisien
2019	50.933.600	71.200.800	71,53%	Efisien

Sumber dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa efisiensi bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh pada tahun 2016-2019 tingkat efisiensi anggaran belanja berfluktuasi dari tahun ke tahun, mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016 memiliki persentase tinggi sebesar 60.21% pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 20.71%, pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 26.62% dan pada tahun 2019 kembali mengalami persentase tinggi sebesar 71.53%. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi di bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam mengelola anggaran belanja dari tahun 2016-2019 memperbaiki kinerjanya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin baik. Sehingga secara keseluruhan dari tahun 2016-2019 bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh bisa di katakana sangat efisiensi karena hasil rata-rata selama 4 tahun sebesar 44,76% dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.

4.5 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

4.5.1 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Bagian Pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah, setiap pekerjaan pegawai dalam pemerintah sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan wewenang, tingkat pencapaian tujuan aparatur dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan pemerintah dan memberikan hasil yang bermanfaat Mahmudi (2013:86).

Untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai organisasi perangkat pemerintah perlu dilakukan pengukuran efektivitas dan analisis efektivitas. Adapun hasil perhitungan tingkat efektivitas atau analisis efektivitas anggaran belanja publik bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh tahun anggaran 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas
Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun
2016-2019

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja	Jumlah Realisasi Belanja	Persentase %	Kriteria
2016	189.720.000	174.282.500	91.86%	Efektif
2017	153.873.500	151.869.500	98.69%	Efektif
2018	1.605.295.000	1.600.006.800	99.67%	Efektif
2019	131.289.600	122.134.400	93.02%	Efektif

Sumber dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 dijelaskan bahwa selama periode anggaran tahun 2016-2019 tingkat efektivitas anggaran belanja meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 persentase mulai mengalami penurunan 93.02%, pada tahun 2016-2019 dikatakan efektif, dalam empat tahun periode penelitian besarnya persentase rata-rata 95,81% masuk dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas penyerapan anggaran belanja tertinggi pada tahun 2018 yaitu dengan rasio 99,67% dan terendah pada tahun 2016 dengan rasio 91,86%.

4.5.2 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh

Efisiensi merupakan sebagai hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien

apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya Mahmudi (2013:87)

Analisi efisien menggambarkan perbandingan anantara besarnya biaya langsung yang di keluarkan untuk belanja dengan realisasi belanja, setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Adapun tingkat efisiensi belanja publik bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh tahun anggaran 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan
Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh
Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi Belanja langsung	Jumlah Realisasi Belanja	Persentase %	Kriteria
2016	10.826.000	174.282.500	60.21%	Efisien
2017	31.454.500	151.869.500	20.71%	Sangat Efisien
2018	426.001.950	1.600.006.800	26.62%	Sangat Efisien
2019	50.933.600	71.200.800	71,53%	Efisien
Rata-rata	129.804.013	499.339.900	44.76%	Sangat Efisien

Sumber dari Dinas Pangan Pertanian Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja publik bagian pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh sangat efisien dalam empat tahun periode penelitian dengan besarnya presentase rata-rata 44.76%. Tingkat presentase efisien tertinggi pada tahun 2019 dengan rasio efisiensi sebesar 71.53% dan nilai terendah dari rasio efisiensi pada tahun 2017 dengan besarnya nilai rasio 20.71%.

4.6 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara generalisasi. Analisis deskriptif untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran belanja bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019 sudah efektif dan efisien, karena pada umumnya alokasi anggaran belanja dan belanja langsung di instansi tersebut sudah berada di atas 90.00% dan di bawah 60.00% (mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-3270). Adapun jumlah terbesar dari alokasi anggaran belanja dan belanja langsung bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh untuk efektivitas yaitu sebesar 99,67% yang dialokasikan pada tahun 2018. Sedangkan terendah sebesar 91.86% yang di alokasikan pada tahun 2016 dan untuk efisiensi yaitu sebesar 71.53% yang dialokasikan pada tahun 2019. Sedangkan jumlah terendahnya 20.71% yang dialokasikan pada tahun anggaran 2017.

Berdasarkan analisis di atas dapat dilihat bahwa,tingginya nilai rasio efektivitas dan rendahnya nilai rasio efisiensi belanja langsung sehingga mengindikasikan kinerja bagian Pertanian Pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan

Perikanan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019 secara umum sudah efektif dan sangat efisien.

Dalam mencapai anggaran belanja yang efektif dan efisien upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh yaitu dengan meningkatkan kualitas kerja aparatur Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam peran DPPKP sebagai lembaga perencanaan yang profesional, mandiri dan andal serta melakukan evaluasi dan analisis terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam hal meningkatkan anggaran belanja yang lebih efektivitas dan efisiensi maka DPPKP kota Banda Aceh dapat mempertahankan mengelola keuangan dengan baik agar anggaran yang digunakan dapat bermanfaat bagi aparatur dan masyarakat DPPKP Kota Banda Aceh. dikarenakan pengalokasian anggaran belanjanya dalam bentuk belanja langsung juga cenderung lebih rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan anggaran belanja yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan presentase 99.67% dan yang terendah pada tahun 2016 dengan presentase 91.86%. Anggaran belanja tahun 2016 sampai tahun 2019 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya terjadi penurunan dilihat dari segi persentasenya masih dalam kategori efektif.
2. Tingkat efesiensi anggaran belanja secara keseluruhan sudah berjalan dan sudah terealisasi. Pengelolaan anggaran belanja dikatakan sudah memenuhi syarat efesiensi yaitu jika penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum. Anggaran belanja pada dinas DPPKP Kota Banda Aceh selama 2016 sampai tahun 2019 sudah sangat efisien.

1.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagian Pertanian pada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh agar lebih meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja di tahun-tahun selanjutnya, dan mempertahankan efesiensi dalam pengelolaan anggaran belanja di tahun-tahun selanjutnya.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony, Aries. 2019. Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran Dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 10 No. 2. November.
- Ariana, et all, 2012. *Management Control System*, Jilid I Dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala Dankrista, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Bastian, 2014. Akuntansi Sektor Publik suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta
- Dwi Nofita, S. , Sri Mintarti. Salmah Pattisahusiwa 2018. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Jurnal Kinerja 15 (1)*, 2018 38-43
- Fahrianta , R, Y, . Dan Carolina, V. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Vol 13 No 1*
- Gunawan, S.G. , 2008, *Farmakologi Dan Terapi* Ed 5, Jakarta : Balai Penerbitan Fkui.
- Halim, Abdul 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko Mardiyanto. 2009. *Inti Sari Manajemen Keuangan*. Jakarta. Pt. Grasindo.
- Haryanto, Sahamuddin, Dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- <https://distanbun.acehprov.go.id/>
- Haruman. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Semarang: Pt. Gramedia
- Jhon, 2016. *Akuntansi Sektor Public*. Jakarta : Salemba Empat
- Kurniawan, 2015. Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Daerah, Andi , Yogyakarta
- Kuncoro, 2013
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*. Jakarta; Sekretariat Negara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 690.900.327 Tahun 1996. *Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*. Jakarta : Sekretariat Negara
- Mardiasmo. 2013. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Cv Andi
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Keempat*, Yogyakarta: Cv Andi
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*, Yogyakarta
- Maulana aries putra. 2019. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Dinas Perhubungan Aceh. *Skripsi Aceh : Universitas Muhammadiyah Aceh*
- Mardiasmo, Qurrata 2016 . *System Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat
- Nur Indrianto, Dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Peneitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi 1*. Cetakan Ketiga, Penerbit Bpfeyogyakarta: Yogyakarta
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Public*. Jakarta : Salemba Empat
- Nordiawan, Dedi Dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Public. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat
- Pangkey Imanuel, Pinatik Sherly, 2015. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA 33 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 33-43*

- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21. *Tentang Klasifikasi Belanja jakarta*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Prawieonegoro, 2014 Akuntansi Sektor publik, penerbit Bayumedia publishing malang.
- Rudianto. 2013. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. *Skripsi Semarang : Universitas Dian Nuswantoro*
- Sangadji , Etta Mamang, & Sopiah. 2010. *Metedologi Penelitian- Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta, Andi
- Sugiyono. 2009. *Metode Peneitian Bisnis. Cetakan Keempat Belas*, Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung
- Wirayna. 2015. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang. *Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang*.